

Responden Beri Nilai 3

Dari Halaman 1

pada Ahad, 19 Oktober 2025.

Celios mengungkapkan 29% jurnalis memberi nilai 1 dari 10 atau sangat buruk terhadap kinerja Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir.

Sementara sebanyak 14% memberi nilai 2 dari 10, dan 20% memberi nilai 3 dari 10.

Di sisi lain, hanya 2% responden yang memberikan nilai 8 dari 10, dan 1% responden memberi nilai 9 dari 10. Tidak ada responden yang memberi nilai sempurna atau 10 kepada Prabowo-Gibran.

Rata-rata penilaian tersebut turun dari survei penilaian kinerja yang dilakukan Celios saat 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ada penurunan dari kualitas kinerja Prabowo Subianto dan Gibran berdasarkan hasil teman kami," kata Media.

NILAI 100 HARI

Ketika pemerintahan baru berumur 100 hari, Prabowo mendapatkan nilai 5 dari 10, sementara Gibran mendapatkan nilai 3 dari 10. Angka tersebut kini turun menjadi 3 dari 10 untuk Prabowo,

Politik Banjir dan Mental Proyek

Dari Halaman 1

surut di kawasan inti kota berkisar dua hingga lima jam, tapi di Medan Utara bisa lebih dari delapan jam. Padahal setiap tahun, APBD mengalir deras. Tahun ini saja, Rp128 miliar diserap untuk proyek drainase dan pompa. Namun,

Triliunan Rupiah Mengalir Kota Tetap Tenggelam

Dari Halaman 1

Dijelaskannya, selama beberapa tahun terakhir, pemerintah kota telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menanggulangi banjir. Proyek besar seperti kolam retensi, perbaikan drainase utama, dan penataaan sungai disebut-sebut sebagai solusi permanen.

Namun, hasilnya, nihil. Kolam retensi yang menelan anggaran ratusan miliar tampak tidak berfungsi maksimal. Air tetap meluap, drainase tetap tersumbat, dan warga tetap terendam.

Publik tentu berhak bertanya: ke mana perginya uang rakyat sebesar itu?

Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian proyek penanggulangan banjir dikerjakan tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat.

"Pengerjaan drainase sering kali asal jadi, cepat rusak, dan tidak terintegrasi dengan sistem utama.

Mentrans Anggarkan Rp300 Miliar

Dari Halaman 1

berbagai daerah.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ekosistem kehidupan bagi para transmigran, sekaligus membantu pemerintah daerah menjalankan tugas pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

“Untuk pengembangan kawasan transmigrasi, infrastruktur dan lain sebagainya, kami mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar untuk membantu pemerintah daerah, membantu tugas-tugas pemerintah daerah. Kami tidak buang badan," ujar Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman usai menuntaskan open house 24 jam di kantornya di Jakarta, Minggu.

Iftitah menjelaskan mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, pengembangan masyarakat di kawasan

Mahfud dan Jimly Masuk Komite Reformasi Polri

Dari Halaman 1

“Tinggal diumumkan (tim Komite Reformasi Polri).”

KOMITE

Komite --menurut referensi google-- ialah sekelompok orang yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi atau tugas tertentu atas nama organisasi yang lebih besar.

Komite dibentuk untuk meneliti, menyelidiki, membuat rekomendasi, atau mengambil keputusan mengenai masalah spesifik.

Komite sering kali terdiri dari individu dengan keahlian beragam untuk memungkinkan kolaborasi dan perspektif yang berbeda.

Prasetyo menjelaskan, pihaknya belum mengumumkan Komite Reformasi Polri lantaran sejumlah anggota yang telah ditunjuk berhalangan hadir pada pekan ini. "Jadi begini ya, sebenarnya mau diumumkan minggu ini, tadinya. Tapi beberapa kali hari yang dipilih, ada beberapa di antara anggota yang masuk ke dalam Komisi Reformasi Kepolisian ini berhalangan, begitu lho," ucap Prasetyo.

MBG: Program Prematur, Tata Kelola yang Sakit

Dari Halaman 1

dijalankan tanpa pijakan legal yang jelas, tanpa hierarki normatif yang memenuhi asas lex superior derogat legi inferiori.

Sampai saat ini, MBG hanya berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau minimal Peraturan Presiden yang secara eksplisit mengatur mekanisme MBG.

Artinya, secara hukum, program MBG tidak memiliki dasar normatif yang mengikat untuk mengatur aspek pembiayaan, tata kelola, maupun tanggung jawab hukum para pelaksananya. Perpes itu hanya mengatur kelembagaan BGN, bukan mandat spesifik tentang penyelenggaraan program makan bergizi. Dengan kata lain, MBG berjalan dalam ruang abu-abu legalitas: ia de facto dilaksanakan, tapi de jure tak memiliki legitimasi hukum yang memadai.

Ketiadaan dasar hukum ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan cacat konstitusional. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap kebijakan yang menggunakan dana publik harus memiliki dasar hukum yang sah dan berjenjang. UU Keuangan Negara dan UU Administrasi

dan 2 dari 10 untuk Gibran.

Celios juga bertanya kepada responden mengenai sektor-sektor yang belum ditangani dengan baik oleh Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir. Hasilnya: 19% menjawab sektor penegakan hukum dan HAM; 17% menjawab sektor lingkungan; 14% menjawab ekonomi; 14% menjawab pendidikan; 11% menjawab kesehatan; 11% menjawab sektor sosial; 7% menjawab sektor infrastruktur; dan 7% menjawab pertanian.

Menurut Media, laporan tersebut bukanlah opini Celios. "Melainkan agregasi rangkuman dari suara masyarakat yang kami lakukan lewat metodologi penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja ini," ucap dia.

PENILAIAN PAKAR

Celios menggunakan metode survei berbasis expert judgement atau penilaian pakar. Mereka membentuk panel yang terdiri dari 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia mewakili sejumlah desk pemberitaan, termasuk ekonomi, sosial-politik, hukum dan hak asasi manusia, hingga lingkungan.

Para responden disurvei oleh Celios pada 30

hasilnya tetap sama, warga harus memompa air dari ruang tamu dengan ember, bukan mesin.

Di sinilah “politik banjir” menemukan pangungunya. Ketika proyek fisik dijadikan ukuran keberhasilan, bukan air yang surut atau warga yang terbebas dari genangan. Di meja penganggaran, setiap titik banjir bisa diterjemahkan jadi

Begitu pula dengan kolam retensi yang dibangun tanpa memperhitungkan daya tampung riil dan kondisi aliran air di sekitarnya. Akibatnya, fungsi teknis tidak berjalan dan hasil pembangunan hanya menjadi pajangan beton tanpa manfaat," ucapnya.

Lebih dari itu, lanjutnya, muncul pula dugaan adanya ketidakefisienan dan pemborosan anggaran. Proyek-proyek yang dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran sering disebut tanpa memperhatikan kualitas, hanya demi memenuhi target serapan dana. Mekanisme evaluasi pun lemah, tidak ada laporan publik yang transparan mengenai hasil audit atau efektivitas proyek.

"Inilah saatnya Pemerintah Kota Medan melakukan evaluasi menyeluruh dan audit terbuka terhadap seluruh proyek penganggulangan banjir. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan, dan sejauh mana hasilnya dirasakan.

transmigrasi oleh pemerintah pusat dibatasi maksimal lima tahun sejak penempatan.

Setelah itu, pengembangan permukiman transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Namun, ia menyebut banyak daerah belum siap sepenuhnya menjalankan tanggung jawab tersebut secara mandiri.

Iftitah menegaskan, transmigrasi bukan lagi sekadar memindahkan penduduk dan membangun rumah. Program ini kini diarahkan untuk menciptakan ekosistem kehidupan yang lengkap, mencakup lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Tujuannya adalah agar warga transmigran memiliki alasan kuat untuk menetap dan berkontribusi aktif dalam pembangunan kawasan.

Iftitah lebih lanjut mengatakan, dalam upaya mendukung pengembangan kawasan transmigrasi,

SEMBILAN NAMA

Menurut Prasetyo, sembilan tokoh yang akan mengisi komite berasal dari latar belakang hukum dan kepolisian, termasuk mantan Kapolri dan profesional di bidangnya. Beberapa nama yang beredar di antaranya Mahfud Md dan Jimly Asshiddiqie. "Anggota kurang lebih sembilan orang. Ya bermacam-macam, tapi yang pasti tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian," ucapnya.

Meski belum merinci nama-nama tersebut, Prasetyo memastikan daftarnya sudah final dan tinggal menunggu pengumuman resmi oleh presiden. "Sudah (ada nama-namanya). Tinggal menunggu diumumkan. Nanti tunggu nama-namanya," ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).

NAMA LAIN

Selain Mahfud dan Jimly, sejumlah nama lain yang dikabarkan termasuk dalam sembilan anggota Komite Reformasi Polri ini adalah: Menko Kumham Impias Yusril Ihza Mahendra; Menkum Supratman Andi Agtas; dan Wamenko Kumham Impas Otto Hasibuan.

Pemerintahan menegaskan penggunaan APBN untuk program strategis wajib didukung oleh regulasi formal yang mengatur tujuan, mekanisme, dan pengawasan. Ketika MBG digulirkan tanpa dasar undang-undang, maka pelaksanaan dan penyaluran dananya berpotensi melanggar asas legalitas, sebuah prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang menyatakan: tiada kewenangan tanpa dasar hukum.

Di sinilah masalahnya menjadi semakin kompleks. Karena tidak ada dasar hukum yang tegas, tata kelola MBG pun goyah. Mekanisme pembayaran ke penyedia katering tidak punya landasan regulatif yang seragam. Petunjuk teknis dan standar gizi berbeda-beda antarwilayah. Prosedur pengawasan pun kabur: siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran mutu, keterlambatan, atau bahkan penyalahgunaan dana? Dalam ketiadaan norma hukum, semua aktor menjadi “abu-abu”: tidak jelas siapa pelaku, siapa pengawas, siapa penanggung jawab.

Ketiadaan dasar hukum ini juga menjadi akar dari berbagai kekacauan di tubuh BGN, mulai dari konflik kepentingan antarejabat, hingga gesekan dengan lembaga lain yang merasa tak dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Tanpa kerangka hukum yang pasti, setiap keputusan BGN rawan

September - 13 Oktober 2025. Celios meyakini evaluasi kinerja lebih tepat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang pemerintahan.

"Dan di antara kelompok-kelompok masyarakat, yang kami lihat sangat powerful dan mengikuti day-to-day jalannya pemerintahan itu adalah para jurnalis," kata Media.

SATU TAHUN

Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki satu tahun pada Senin 20 Oktober 2025, hari ini. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai, kepala negara telah bekerja keras.

"Prabowo tidak punya tangkal merah," kata Sjafrie di kantornya, Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat (17/10).

Sjafrie mengklaim kerja-kerja yang telah dilakukan Prabowo selama memimpin pemerintahan diprioritaskan untuk rakyat. Sjafrie berujar, keberpihakan terhadap rakyat itu terpotret dari program kerjanya.

"Terutama yang menyangkut soal pangan. Prabowo selalu memikirkan bagaimana keberpihakan kepada rakyatnya," ujar Sjafrie. **(tem/cp/js)**

angka kontrak, bukan angka penderitaan.

Kota ini butuh keberanian baru, bukan membangun lebih banyak kolam, tapi membongkar kebijakan yang dangkal. Sebab akar persoalan banjir di Medan bukan sekadar teknis, melainkan moral. Selama banjir hanya dianggap proyek, genangan akan tetap setia. (*)

Lembaga pengawas seperti BPK dan aparat penegak hukum juga perlu turun tangan jika ditemukan indikasi penyimpangan. Karena banjir di Medan bukan lagi sekadar persoalan cuaca, ia telah menjadi indikator kebocoran tata kelola pemerintahan," terangnya.

Tegasnya lagi, Jika kondisi ini dibiarkan, kepercayaan publik akan terus terkikis. Tidak ada gunanya membangun kolam retensi megah atau proyek drainase baru jika prinsip akuntabilitas dan integritas diabaikan. Warga Medan butuh solusi nyata, bukan sekadar janji politik atau proyek seremonial.

Selama air masih menggenangi jalanan setiap kali hujan turun, selama itu pula uang rakyat masih dianggap enteng. Banjir bukan takdir, tapi hasil dari kebijakan yang salah urus. Dan sudah waktunya pemerintah membuktikan, bahwa dana triliunan rupiah yang dihabiskan bukan sekadar mengalir ke saluran yang salah.**(A-10)**

Kementrans saat ini fokus pada lima program utama transmigrasi.

Pertama, Transmigrasi Tuntas, yaitu program penyelesaian masalah lahan di kawasan transmigrasi. Kedua, Transmigrasi Lokal, yang program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat setempat tanpa perlu berpindah jauh untuk mengurangi urbanisasi.

Ketiga, Transmigrasi Patriot, yaitu mendistribusikan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mengabdikan di kawasan transmigrasi.

Keempat, Transmigrasi Karya Nusantara, program yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis potensi kawasan transmigrasi untuk menciptakan lapangan kerja.

Kelima, Trans Gotong Royong, yang mendorong kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, kampus, dan daerah untuk membangun kawasan transmigrasi bersama-sama.**(ant/js)**

Selain itu, beberapa nama mantan Kapolri juga dikabarkan masuk dalam komite tersebut seperti: Tito Karnavian; Idham Aziz; dan Badrodin Haiti.

Alhasil, delapan dari sembilan nama tokoh itu, kemungkinan besar adalah: Prof Dr Mohammad Mahfud Md, SH (68, ahli hukum tata negara UII Yogyakarta, mantan Menko Polhukam); Prof Dr Jumly Asshiddiqie, SH, MH (69, ahli hukum tata negara UI Jakarta); Prof Dr Yusril Ihza Mahendra (69, ahli hukum tata negara, Menko Kumham Impas); Dr Otto Hasibuan (79, ahli hukum, Wamenko Kumham Impas); Dr Supratman Andi Agtas (56, Menkum); Jenderal Pol purn. Idham Aziz (62, mantan Kapolri); Jenderal Pol purn. Drs Badrodin Haiti (67, mantan Kapolri); Jenderal Pol purn. Prof Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD (60, Mendagri, mantan Kapolri).

Belum ada informasi mengenai nama kesembilan, misalnya apakah termasuk juga Menko Polkam yang kini dijabat Jenderal TNI purn Djamari Chaniago (76), mengingat Polri berada di bawah koordinasinya di samping TNI, Kemendagri, Kemenlu, Kemenan, Kemenkomdisi, dan Kejaksaan Agung. **(sindonews/google-cp)**.

digugat karena dianggap ultra vires (bertindak di luar kewenangan). Dalam konteks tata kelola negara, ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang sistemik, bukan karena niat jahat semata, melainkan karena negara membiarkan kebijakan berjalan tanpa peta hukum.

Oleh karena itu, menyebut MBG sebagai program prematur bukanlah hiperbola. Ia adalah bayi kebijakan yang lahir tanpa akta kelahiran hukum. Pemerintah tergesa mencanangkannya untuk kepentingan politik dan pencitraan, tetapi lupa menyiapkan fondasi legal yang menjadi prasyarat akuntabilitas publik. Dalam perspektif keadilan hukum, ini berbahaya: rakyat memang berhak mendapat gizi, tapi mereka juga berhak atas kepastian hukum dalam pengelolaan dana publik.

Negara hukum (rechtsstaat) menuntut kebijakan seharusnya lahir dari hukum, bukan dari kehendak politik. MBG boleh bergizi bagi wacana, tapi secara normatif ia malnutrisi. Tanpa dasar hukum yang sah, seluruh operasionalnya berpotensi melanggar prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Hukum tidak bisa membenarkan kebaikan yang dijalankan dengan cara yang salah. Karena dalam negara hukum, tujuan baik pun harus berjalan di atas rel hukum yang benar, bukan di atas meja makan politik. (*)

Satu Desa di Asahan

Dari Halaman 1

Bandung 2 yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II melalui pihak ketiga, telah mengakibatkan desa mereka terkena musibah banjir kiriman.

Sebab, pelaksana proyek telah membuka bibir sungai menuju tanggul, sehingga merusak tanggul existing yang ada. Akibatnya, Desa Sei Dua Hulu kebanjiran.

"Senin besok kami akan melihat tanggul yang jebol itu," kata Sumardi.

Ia juga mengaku, akibat banjir yang melanda desanya, warga desa mengalami kerugian yang cukup besarzl, karena lahan pertanian mereka terendam banjir.

"Pihak BBWS Sumatera II harus bertanggungjawab, dan mengganti kerugian yang dialami warga," imbuhnya.

Keluhan masyarakat ini juga telah disampaikan Per-kumpulan

Masyarakat Demokrasi Empatbelas melalui surat resmi yang dilayangkan ke Kantor BBWS Sumatera II. Tapi sayang, hingga berita ini masuk ke meja redaksi, pihak BBWS Sumatera II belum merespon atau menanggapi keluhan warga tersebut.

"Sudah kita surati BBWS Sumatera II, tapi hingga kini belum memberi tanggapan. Selanjutnya kita akan menyurati Kementerian PU," ungkap Muhri Fauzi Hafiz, Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Empatbelas.**(A-10)**

Israel Luncurkan

Dari Halaman 1

menyerang Rafah yang berada di selatan Gaza. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari militer Israel ataupun Hamas.

Israel terus menyalahkan Hamas yang dikatakan sudah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Gencatan senjata ini diprakarsai Amerika Serikat dan telah disetujui kedua belah pihak.

Militer Israel mengatakan pada Jumat bahwa "beberapa teroris" melepaskan tembakan ke arah tentara di Rafah, tanpa menyebabkan cedera.

Militer kemudian mengatakan mereka menyerang kelompok "teroris" lain yang sedang mendekati pasukan di Khan Younis pada hari yang sama. Mereka mengatakan bakal terus beroperasi untuk menghilangkan ancaman langsung.

Pemerintah Israel dan Hamas telah saling menuduh atas pelanggaran gencatan senjata selama berhari-hari, dengan Israel mengatakan bahwa perlintasan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir akan tetap ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Israel dan Hamas terlibat perselisihan mengenai pemu-langan jenazah sandera. Israel menuntut Hamas memenuhi kewajibannya menyerahkan jenazah 28 sandera yang tersisa.

Hamas telah memulangkan 20 sandera yang masih hidup dan 12 sandera yang telah meninggal, tetapi mengatakan proses tersebut membutuhkan upaya dan peralatan khusus untuk menemukan jenazah yang terkubur di bawah reruntuhan.**(cnni/js)**



Dari Halaman 1

pemerintahan. Namun sebelum terburu menyimpulkan, penting untuk memahami siapa respondennya, bagaimana metode surveinya, dan apa konteksnya.

Celios menggunakan pendekatan expert judgement, yakni survei berbasis penilaian pakar. Dalam hal ini, yang disebut “pakar” adalah jurnalis dari 60 lembaga pers nasional yang sehari-hari meliput berbagai isu pemerintahan ekonomi, politik, hukum, HAM, hingga lingkungan. Survei dilakukan antara 30 September hingga 13 Oktober 2025, menjelang genap satu tahun masa jabatan Prabowo-Gibran.

Dengan demikian, survei ini bukanlah cerminan dari opini publik umum, melainkan potret persepsi profesional media terhadap kinerja pemerintah. Penilaian para jurnalis tentu berbeda dengan penilaian masyarakat biasa. Mereka terbiasa melihat fakta lapangan secara langsung, menganalisis pernyataan pejabat, serta memeriksa konsistensi antara janji dan realisasi kebijakan.

Di satu sisi, pendekatan ini menarik karena memberi gambaran “cermin dalam” tentang persepsi kelompok yang memahami kerja-kerja pemerintahan. Jurnalis adalah kelompok yang paling dekat dengan denyut kebijakan publik. Jika mereka menilai kinerja pemerintah buruk, bisa jadi itu sinyal adanya persoalan komunikasi, transparansi, atau akuntabilitas kebijakan.

Namun, di sisi lain, survei seperti ini memiliki keterbatasan besar. Pertama, jumlah respondennya kecil hanya 120 orang sehingga tidak bisa mewakili seluruh populasi masyarakat Indonesia. Kedua, bias profesi mungkin muncul. Jurnalis, dengan sikap kritis dan skeptisnya, cenderung memberi penilaian lebih keras terhadap kekuasaan. Ketiga, Celios tidak menjelaskan margin of error atau tingkat kepercayaan surveinya, padahal ini penting untuk menilai validitas ilmiah.

Karena itu, hasil survei Celios sah sebagai data persepsi kalangan jurnalis, tetapi tidak bisa digeneralisas menjadi suara rakyat. Ia lebih tepat dibaca sebagai bentuk evaluasi profesional, bukan barometer elektorat atau politik.

Menariknya, survei ini menunjukkan penurunan signifikan dibanding penilaian 100 hari pertama pemerintahan. Dulunya, Prabowo mendapat nilai 5, kini turun menjadi 3. Artinya, dalam persepsi jurnalis, kinerja pemerintahan dianggap tidak menunjukkan perbaikan berarti selama satu tahun. Sektor penegakan hukum dan HAM menempati posisi terburuk, disusul lingkungan dan ekonomi.

Tentu, hasil ini patut menjadi bahan refleksi bagi pemerintah.

Penilaian rendah dari kalangan media bisa menjadi alarm dini: komunikasi publik belum efektif, kebijakan belum menyentuh akar masalah, atau kepekaan terhadap isu-isu sosial belum tampak. Dalam era keterbukaan informasi, persepsi publik sering dibentuk oleh persepsi jurnalis. Maka, mengabaikan suara media sama saja menutup mata terhadap realitas opini publik yang lebih luas.

Pada akhirnya, kredibilitas survei seperti ini bergantung pada cara kita membacanya. Ia bukan sekadar angka, tetapi refleksi dari cara pemerintah dilihat oleh mereka yang paling sering menatapnya dari dekat. Pemerintah boleh saja berargumen bahwa rakyat puas, tetapi jika jurnalis yang memantau kinerja harian memberi nilai rendah, itu sinyal serius untuk berbenah.

Survei Celios tidak perlu ditolak, tetapi juga tidak perlu ditelan mentah. Ia bukan “vonis rakyat”, melainkan catatan cermin dari ruang redaksi: bahwa kekuasaan, seberapa kuat pun, tetap butuh kritik agar tidak kehilangan arah.